

Arahan Penataan Kawasan Alun-alun dan Taman Dodoku Ali Kota Ternate

Arrangement Direction for The Square and Dodoku Ali Park, Ternate City

Zulkifli Nasir

^{1,2}*Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota,, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: zulkiflinasir96@gmail.com*

Abstract. In accordance with Ternate City RTRW for 2012-2032, it is known that the existing area of green open space in the planning year is 146.53 Ha or 5.44% compared to the area of Ternate City itself, but it is expected that in the last year the planning will be broad to 1,503.15 Ha or 55.83% of the land area built. So that it is expected that with the arrangement of the square area and Dodoku Ali park, it can increase the amount of open green space in the city of Ternate itself. At present the area is experiencing visual and functional degradation, this degradation arises due to the emergence of undue land use, namely street vendors who have built stalls both permanently and semi-permanently. This area has an area of 29,809 m², and of that area the PKL stalls have an area of 1,600 m². Apart from land use problems, problems arise from building mass management, circulation and parking, pedestrian paths, open spaces, signage, supporting activities and preservation. Therefore it is necessary to arrange in order to overcome the chaos in the area.

Keywords: Square, Park, Arrangement.

Abstrak. Sesuai dengan RTRW Kota Ternate tahun 2012-2032 diketahui bahwa luas eksisting RTHnya pada tahun penyusunan prodak rencana yakni sebesar 146,53 Ha atau 5,44% daripada luas Kota Ternate sendiri namun diharapkan hingga tahun terakhir perencanaan dapat meningkat hingga mencapai luas yakni 1.503,15 Ha atau 55,83% dari luas lahan terbagun. Sehingga diharapkan dengan ditatanya Kawasan alun-alun dan taman Dodoku Ali dapat menambah jumlah luas RTH di Kota Ternate sendiri. Saat ini Kawasan tersebut mengalami degradasi visual dan fungsional, degradasi tersebut muncul akibat dari munculnya guna lahan yang tidak semestinya yakni pedagang kaki lima yang mana telah mambangun lapak baik permanen maupun semi permanen. Kawasan ini memiliki luas 29.809 m², dan dari luas tersebut lapak PKL memiliki luas 1.600 m². Selain dari masalah tata guna lahan juga muncul masalah dari tata massa bangunan, sirkulasi dan parkir, jalur pejalan kaki, ruang terbuka, signage, pendukung kegiatan dan preservasi. Oleh karena itu perlu adanya penataan agar dapat mengatasi kesembrawutan di Kawasan tersebut.

Kata Kunci: Alun-alun, Taman, Penataan.

A. Pendahuluan

Belakangan ini banyak terjadi kerusakan akibat dari kurang baiknya rencana penataan yang menyebabkan suatu kawasan menjadi sembrawut, hal ini terjadi baik di ruang publik maupun non publik. Sebelumnya mengenai hal tersebut juga telah di jelaskan dalam Al-Qur'an seperti di bawah ini.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Ruum, 41).

Dari kandungan ayat di atas dapat dilihat bahwa sahnya kerusakan itu benar adanya. Kawasan yang rusak tentu menjadi sembrawut dan tidak layak untuk dijadikan sebagai ruang aktifitas masyarakat karena dapat mengganggu tingkah laku masyarakatnya selain itu juga dapat membuat nilai dari Kawasan tersebut menjadi menurun baik dari segi fungsional maupun visualnya.

Seperti halnya yang terjadi di Kawasan Alun-alun dan Taman Dodoku Ali Kota Ternate yang mana

menjadi lokasi studi dalam penelitian ini. Beberapa tahun kebelakang kondisinya semakin memburuk dikarenakan penataan yang kurang baik. Lokasi tersebutnya lebih dikenal dengan sebutan Kawasan Ngara Lamo yang terdiri dari Lapangan Ngara Lamo dan Taman Dodoku Ali, padahal dengan lokasinya yang berada tepat di depan Keraton Kesultanan Ternate patunya selalu dijaga. Penilaian kesembrawutan tersebut di nilai dari 9 pokok masalah yang muncul yakni dari kondisi Tata Guna Lahan, Bentuk dan Masa Bangunan, Sirkulasi dan Parkir, Jalur Pejalan Kaki, Ruang Terbuka, Signage, Pendukung Aktifitas, Preservasi dan buruknya sistem drainase.

Masalah yang pertama yakni mengenai Tata Guna Lahan, beberapa tahun kebelakan muncul masalah yakni adanya PKL yang mana pada awalnya pada Kawasan tersebut tidak ada PKL. Setiap tahunnya lokasi tersebut sering dijadikan lokasi acara rakyat yakni Legu Gam yang mana pada pelaksanaannya sering muncul stand-stand yang dijadikan lapak sebagai ajang pameran hasil buah tangan masyarakat khas maluku utara dan juga terdapat stand-stand masyarakat sebagai lokasi untuk berdagang selama masa Legu Gam berlangsung, namun baru lima tahun terakhir setelah masa Legu Gam berakhir stand-stand yang berfungsi sebagai ruang untuk berdagang di biarkan begitu saja yang menyebabkan terjadinya degradasi fungsional. Selain itu masalah lainnya dari Tata Guna Lahan ini adalah masalah buruknya penataan yang menyebabkan ketidak jelasan TGLnya yang juga membuatnya terlihat kumuh.

Masalah yang ke dua muncul dari Bentuk dan Masa Bangunan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya beberapa tahun kebelakang muncul PKL yang berlapak di sekitar Kawasan

tersebut. Munculnya PKL tersebut tentunya tidak hanya mendatangkan pedagangnya tetapi juga bangunannya. Kini di Kawasan tersebut telah terdapat bangunan semi permanen dan permanen yang dijadikan lapak dari pada PKL itu sendiri, selain itu juga pada waktu tertentu terdapat pula PKL yang berdagang di trotoar yang berada di sekitar Kawasan tersebut. Hal ini tentunya selain mengganggu pandangan juga mengganggu pengguna dalam hal ini adalah para pejalan kaki itu sendiri. Dengan adanya hal tersebut berpengaruh terhadap tiga hal yang berkaitan dengan Tata Massa Bangunan yakni Kepejalan Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, dan Garis Sempadan Bangunan yang mana mengakibatkan baik secara fungsional maupun visual menjadi terganggu.

Masalah ke tiga yakni mengenai Sirkulasi dan Parkir, namun lebih ditekankan pada persoalan parkir. Pada Kawasan tersebut tidak terdapat lokasi parkir, akibatnya pada waktu tertentu terutama pada pelaksanaan acara Legu Gam muncul banyak parkir liar yang tentunya dapat merugikan para pengguna jalan lainnya karena dapat menyebabkan penumpukan kendaraan. Parkir liar yang muncul tentunya pada bahu jalan dan di dominasi oleh kendaraan roda dua mengingat jumlah kendaraan terbanyak di Kota Ternate yakni kendaraan roda dua namun tidak menutup kemungkinan adanya parkir liar oleh kendaraan roda empat. Hal ini tentunya sangat di sayangkan mengingat Kawasan tersebut merupakan Kawasan strategis.

Masalah ke empat muncul dari jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki tentunya perlu diperhatikan karena dengan kondisi yang baik tentunya dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Sayangnya pada beberapa titik jalur pejalan kaki ini tidak ada yang menyebabkan batas antara

jalan dan lahan pun terlihat buruk. Selain itu juga jalur pejalan kaki pada Kawasan tersebut yang tepatnya berada di Taman Dodoku Ali terkesan sembrawat dan rusak yang menyebabkan ketidaknyamanan penggunaannya.

Masalah ke lima muncul pada ruang terbuka. Berbicara ruang terbuka tentunya terdiri dari ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau (RTNH). Kedua bagian tersebut memiliki masalah yang kompleks yakni belum tertata. Di Kawasan tersebut hanya ada RTH alami yang tentunya hanya terdiri dari pepohonan yang tumbuh tanpa adanya perawatan sedangkan untuk RTNH pernah di tata beberapa tahun silam namun saat ini kondisinya memprihatinkan dan telah rusak.

Masalah ke enam adalah masalah Signage. Walaupun terkadang kurang diperhatikan namun hal ini sangat penting keberadaannya sebagai petunjuk. Dengan adanya signage yang baik dapat mengarahkan masyarakat yang beraktivitas dalam Kawasan tersebut agar lebih terjaga. Selain itu agar Kawasan tersebut terlihat lebih tertata. Namun sebaliknya pada Kawasan alun-alun dan taman Dodoku Ali Kota Ternate hal tersebut belum di perhatikan sehingga menambah kesan kumuh pada Kawasan tersebut.

Masalah ke tujuh yakni masalah pendukung Aktifitas. Yang dimaksud disini adalah sarana untuk mendukung kegiatan masyarakat pada Kawasan tersebut. Untuk saat ini sarana pendukung aktifitas belum tersedia seperti toilet umum, pos penjagaan, penerangan taman, foodcourt, tempat pembuangan sampah, dll. Semua hal tersebut belum tersedia sehingga pada saat tertentu merepotkan masyarakat apabila pada sela-sela aktifitasnya membutuhkan hal tersebut.

Masalah ke delapan adalah

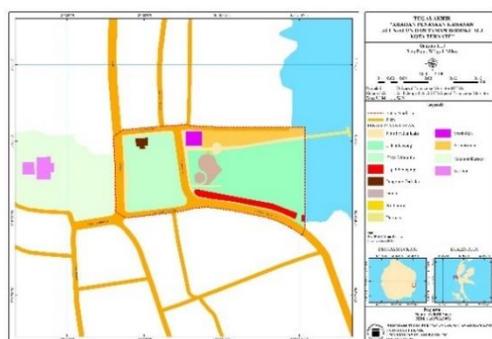
masalah preservasi, masalah ini berkaitan dengan hilangnya identitas daripada Kawasan Alun Alun Kota Ternate yang dikhawatirkan membawa dampak buruk terhadap kearifan loka. Tentunya suatu Kawasan penataan yang baik tentunya perlu memperhatikan kearifan lokal daerah tersebut agar dapat memiliki identitas sehingga memberikan pengalaman ruang kepada masyarakat sebagai ciri pembeda dengan Alun-alun dan taman kota pada daerah lain.

Masalah ke sembilan adalah masalah sistem drainase yang buruk bahkan pada beberapa titik drainase tidak tersedia, tentu sangat disayangkan mengingat drainase berfungsi selain untuk pembuangan limbah cair dari masyarakat juga dapat berfungsi sebagai area limpasan air saat terjadinya hujan sehingga pada Kawasan tersebut tidak terdapat genangan air yang menyebabkan kondisi Kawasan menjadi kumuh dan tidak layak untuk di jadikan sebagai ruang aktifitas masyarakat.

Untuk ruang lingkup wilayah disini adalah kawasan Ngara Lamo. Secara administrasi Kawasan Ngara Lamo merupakan sebuah kawasan yang terdiri dari Lapangan Ngara Lamo dan Taman Dodoku Ali yang terletak di depan Istana Kesultanan Ternate yang berada di Kota Ternate, berada di lokasi yang strategis kawasan ini memiliki luas yaitu 29.809 m² dengan batas administrasi yakni sebagai berikut :

- Utara : Kelurahan Salero
- Selatan : Kelurahan Soa Sio
- Barat : Keraton Kesultanan Ternate
- Timur : Selat Halmahera

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Sumber : Hasil Pengolahan, 2018

Gambar 1. Peta Wilayah Studi

B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) teori yang digunakan dan juga 3 (tiga) landasan kebijakaa. Yang mana mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Alun-alun

Perkembangan alun-alun sangat tergantung dari evolusi pada budaya masyarakatnya yang meliputi tata nilai, pemerintahan, kepercayaan, perekonomian dan lain-lain. Zaman Hindu-Budha, alun-alun telah ada (Buku Negara Kertagama, menyatakan di Trowulan terdapat alun-alun) asal usulnya ialah dari kepercayaan masyarakat tani yang setiap kali ingin menggunakan tanah untuk bercocok tanam, maka haruslah dibuat upacara minta izin kepada “dewi tanah”. Yaitu dengan jalan membuat sebuah lapangan “tanah sakral” yang berbentuk “persegi empat” yang selanjutnya dikenal sebagai alun-alun.

- Fungsi administratif: masyarakat berdatangan ke alun-alun untuk memenuhi panggilan ataupun mendengarkan pengumuman atau melihat unjuk kekuatan berupa

peragaan bala prajurit dari penguasa setempat.

- Fungsi sosial budaya dapat dilihat dari kehidupan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain, apakah dalam perdagangan, pertunjukan hiburan ataupun olahraga. Untuk memenuhi seluruh aktivitas dan kegiatan tersebut alun-alun hanya berupa hamparan lapangan rumput yang memungkinkan berbagai aktivitas dapat dilakukan.

2. Elemen Perencanaan Menurut Hamid Sirvani

Menurut Hamid Shirvani, dalam penyelidikan terhadap bentuk kota terdapat 8 elemen utama yang mempengaruhinya. Adapun elemen-elem tersebut antara lain.

- Tata Guna Lahan
- Tata Massa Bangunan
- Sirkulasi dan Parkir
- Jalur Pejalan Kaki
- Ruang Terbuka
- *Signage*
- Pendukung Kegiatan
- Preservasi

3. *Green City*

Green City (Kota hijau) adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan perlindungan lingkungan sehingga kota menjadi tempat yang layak huni tidak hanya bagi generasi sekarang, namun juga generasi berikutnya.

Green city bertujuan untuk menghasilkan sebuah pembangunan kota yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif

pembangunan terhadap lingkungan dengan kombinasi strategi tata ruang, strategi infrastruktur dan strategi pembangunan sosial. Konsep kota yang ramah lingkungan merupakan pengefektifan dan pengefisienan sumber daya alam dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin adanya kesehatan lingkungan, dan mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan. Green city terdiri dari delapan elemen, yaitu :



4. Waterfront City

Waterfront City adalah konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Pengertian “waterfront” dalam Bahasa Indonesia secara harafiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan (Echols, 2003). Waterfront City/Development juga dapat diartikan suatu proses dari hasil pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air dan bagian dari upaya pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota yang terjadi berorientasi ke arah perairan.

Perkembangan sebuah wilayah memang bisa saja membuat daerah di tepian air

bertumbuh menjadi kota pesisir (waterfront city). Dengan konsep waterfront development maka daerah di tepian laut, sungai dan danau bisa saja dikembangkan secara sengaja menjadi kota pesisir. Biasanya kota pesisir ini muncul karena bagian dari perkotaan yang berbatasan dengan perairan tersebut mengalami pemekaran dan perkembangan. Dalam proses pengembangan suatu kawasan waterfront pada dasarnya dapat di bagi atas tiga jenis pengelompokan yaitu :

- **Konservasi** : Merupakan pengembangan yang bertujuan untuk memanfaatkan kawasan tua yang berada di tepi air dimana pada kondisi sekarang masih terdapat potensi yang dapat di kembangkan secara maksimal.
- **Redevelopment** : Pengembangan jenis ini merupakan suatu usaha untuk menghidupkan atau membangkitkan kembali kawasan pelabuhan dengan tujuan yang berbeda sebagai suatu kawasan penting bagi kehidupan masyarakat kota dengan mengubah fasilitas yang ada pada kawasan yang di gunakan oleh kapasitas yang berbeda pula.
- **Development** : Pengembangan jenis ini merupakan contoh perencanaan yang sengaja dibentuk dengan menciptakan sebuah kawasan tepi air dengan melihat kebutuhan masyarakat terhadap ruang di kota dengan cara penataan

kawasan tepi air. Landasan Kebijakan

5. Landasan kebijakan

Landasan kebijakan yang membahas mengenai penyediaan ruang terbuka yang dijadikan sebagai ruang publik banyak dibahas dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun yang dijadikan sebagai landasan kebijakan, landasan peraturan, dan landasan pedoman yakni meliputi Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kota Ternate tahun 2012-2032, Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Permen PU No. 12 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pemanfaat Ruang Terbuka Non Hijau.

C. Hasil Penelitian dan Arahan Penataan

Dalam hasil penelitian dan arahan penataan akan dipaparkan mengenai hasil yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul sesuai dengan yang telah dibahas dalam Pendahuluan. Berikut merupakan penjelasannya.

1. Arahan Penataan Tata Guna Lahan

Dalam arahan penataan Tata Guna Lahan (TGL) memperhatikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan Permen PU No. 5 tahun 2008. Selain itu juga melihat pada hasil survei lapangan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu didapatkan fasilitas-fasilitas yang akan ditata sebagai Tata Guna Lahan di Kawasan tersebut adalah sebagai berikut.

- Plaza Alun-alun
- Plaza Taman Dodoku Ali

- Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Panggung Terbuka
- Taman Bermain Anak
- Jalur Pejalan Kaki
- Area Parkir
- Jogging Track
- Foodcourt
- Area Perdagangan
- Pos Keamanan
- Wc Umum
- Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Mushollah
- Area Perdagangan
- Shelter
- Kolam Air Mancur

2. Arahan Penataan Tata Massa Bangunan

Dalam penataan Tata Massa Bangunan dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir peningkatan KDB dan membuat masyarakat nyaman dalam melakukan aktifitas di Kawasan ini. Selain itu untuk mengatasi masalah yang terjadi seperti munculnya bangunan permanen maupun semi permanen yang dibangun oleh pedagang yang mana tidak memiliki KDB yang jelas. Selain itu juga untuk agar dapat menata Kawasan dengan baik KDB, KDH dan KLB sesuai dengan ketentuan dan juga hasil analisis. Untuk penataan KDH sesuai dengan ketentuan yakni 30% dari luas Kawasan dengan KDB 70% namun pada arahan penataan KDH melebihi 30% dimaksud agar dapat memberikan daya serap air yang lebih besar. Untuk KLB sendiri 1-2 lantai.

3. Arahan Penataan Sirkulasi dan Parkir

Dalam arahan penataan

sirkulasi dan parkir akan berbeda dengan kondisi eksistingnya namun hanya pada sistem parkirnya saja yang mana pada untuk kondisi eksisting tidak tersedia parkir sedangkan pada arahan penataan akan diadakan. Sedangkan untuk sirkulasinya hanya akan berubah pada pola pergerakan manusia didalam Kawasan Alun-alun itu sendiri sedangkan untuk pola pergerakan kendaraan tidak akan ada perubahan.

4. Arahan Penataan Jalur Pejalan Kaki

Untuk arahan penataan jalur pejalan kaki hanya akan ada sedikit perubahan atau lebih tepatnya penambahan, hal ini dikarenakan pada kondisi eksisting di lokasi Alun-alun sendiri telah terdapat jalur pejalan kaki hanya saja belum maksimal. Dalam arahan penatannya jalur pejalan kaki akan didesain dengan pola loop memutar yang mana agar dimaksud untuk mempermudah akses keseluruhan area selain itu agar pengunjung dapat menikmati keseluruhan Kawasan dengan terarah.

5. Arahan Penataan Ruang Terbuka

1. Dalam penataan ruang terbuka akan berbicara mengenai ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau (RTNH) dalam hal ini keduanya akan ditata dengan baik dengan tujuan agar mengoptimalkan dari segi fungsional dan visual.

Mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau yang telah ada dengan mengembalikan dan menambahkan jenis vegetasi sehingga timbul kesan kawasan

yang indah, asri dan berseri sesuai dengan tujuan penataan. Penanaman vegetasi dilakukan dengan menggunakan tanaman yang berwarna warni yang indah dipandang dan memberikan kesan kenyamanan seperti sejuk, mendinginkan, dan meminimalisir tingkat kebisingan. Untuk Kawasan terbuka non hijau akan ditata menggunakan perkerasan yakni paving blok dan kayu yang mana untuk paving blok bertujuan agar masih memberikan ruang resapan air sedangkan untuk kayu agar dapat memantulkan panas sehingga tidak menahan panas yang datang dari cahaya matahari mengingat iklim lokasi yang termasuk tropis dengan tingkat pencahayaan matahari dari sedang ke tinggi.

6. Arahan Penataan *Signage*

2. Rancangan signage dilakukan dengan memberikan batasan terhadap penyediaan jenis fasilitas informasi seperti baliho, banner, spanduk dan fasilitas informasi lainnya yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, visual dan fungsional kawasan.

Penyediaan fasilitas informasi di desain sedemikian rupa secara unik dan menarik dan mengedukasi sehingga timbul efek terhadap peningkatan citra kawasan.

7. Arahan Penataan Pendukung Aktifitas

Dalam arahan penataan pendukung kegiatan akan ada beberapa fasilitas-fasilitas yang ditambahkan agar pengunjung nyaman saat beraktifitas di Kawasan Alun-alun itu sendiri. Untuk fasilitas yang ditambahkan berupa:

- Foodcourt
- Wc Umum
- Shelter
- Bangku Taman
- Street Furniture
- Lampu Penerangan
- Utilitas

8. Preservasi

Elemen fungsional yang akan dipreservasi adalah Jalur Pejalan Kaki, Plaza Alun-alun, RTH, Mushollah dan Panggung Terbuka. Kelima elemen tersebut dipreservasi dimaksud untuk mempertahankan keberadaan dan juga untuk menambah nilai baik secara visual maupun fungsional.

9. Arahkan Penataan Drainase

Nanti sistem drainase ditata melewati bahu jalan dan juga memotong di dalam tapak sehingga sistem drainase berjalan dengan baik dan nantinya keseluruhan sistem drainase akan berakhir di IPAL sehingga buangan limbah cair tidak langsung ke laut tapi dapat diolah terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Daftar Pustaka

- Febringgo, Ryan. 25 Mei 2013. 8 Elemen Perancangan Menurut Hamid Shirvani.
 Ryanfebringgo.blogspot.id.
 (Diunduh pada 19 Mei 2017, dari <http://ryanfebringgo.blogspot.co.id/2013/05/menurut-hamid-shirvani-terdapat-8.html>)
- Hakim, Rustam. 2012. Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap. Bumi Aksara, Jakarta.
- Joseph De Chiara dan Lee E Koppelman. 1997. Standar Perencanaan Tapak. Erlangga, Jakarta.
- Peranturan Daerah Kota Ternate tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Ternate Tahun 2012-2032.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Permen PU No. 12 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pemanfaat Ruang Terbuka Non Hijau.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

SNI 02-2406-1991 Tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan.

SNI 7391:2008 Tentang Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan.

SNI 03-733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

T. White, Edward. 1985. Analisis Tapak Pembuatan Diagram Informasi Bagi Perancangan Arsitektur. Intermatra, Bandung.

Theodore D. Walker. 1996. Rancangan Tapak dan Pembuatan Detail Konstruksi. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.